

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandai berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat dari merdeka atas wilayah dan pemerintahannya sendiri. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah Irian Barat selama 18 tahun masih tetap dikuasai oleh Belanda, bahkan pihak Belanda berusaha untuk tetap memisahkan Irian Barat dari NKRI. Lahirnya permasalahan Irian Barat sebenarnya didasari oleh keinginan Belanda, untuk memiliki satu propinsi yang tetap dikuasai meskipun telah menyerahkan kemerdekaanya kepada Indonesia.¹

Pemmasalahan Irian Barat timbul setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), dalam KMB Belanda kembali berusaha untuk memisahkan Irian Barat dari NKRI. Dalam naskah Den Haag tanggal 2 November 1949 menjanjikan akan menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan jalan perundingan dalam satu tahun, yaitu sampai 27 Desember 1950.²

Usaha-usaha diplomasi yang dimulai sejak kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 untuk menyelesaikan masalah Irian Barat

¹ R. Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto Panglima komando mandala pembebasan Irian Barat*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 9

² Muhammad Yamin, *Perjuangan Irian Barat Atas Dasar Proklamasi*, Bukittinggi: Nusantara, 1956, hlm. 60

selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini diakibatkan adanya sikap dari pihak Belanda yang berusaha untuk terus menduduki Irian Barat. Bahkan pada bulan Agustus 1952 Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara unilateral memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya.³

Di dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke XI dan ke XII tahun 1957 masalah Irian Barat selalu dimasukkan dalam agenda sidang atas permintaan lima belas negara Asia dan Afrika. Tetapi disidang ini pun Indonesia mengalami kegagalan diplomasi, karena tidak dapat mencapai duapertiga suara anggota PBB. Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan bahwa tidak akan membawa lagi persoalan Irian Barat ke dalam Sidang Umum PBB.⁴

Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) sekaligus menyita semua modal Belanda yang ada di Indonesia. Namun, Belanda tetap berkeras tidak mau mundur. Menghadapi sikap Belanda ini, pihak Indonesia bertindak lebih maju lagi. Atas keputusan Presiden Republik Indonesia dibentuklah Propinsi Otonom Irian Barat dengan Ibukota sementara di Tidore yaitu kota Soa-Siu. Tindakan pemerintah ini disambut hangat dan semangat oleh rakyat Irian Jaya khususnya dan daerah Indonesia lainnya.⁵

³ R. Ridhani, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁴ G. Kesselbrenner, *Irian Wilayah Yang Tak Terpisahkan Dari Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 2003, hlm. 59

⁵ *Api perjuangan pembebasan Irian Barat*, Jakarta : Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1986, hlm.90

Pada tahun 1960 Belanda meningkatkan operasi ofensifnya. Program Papuanisasi mulai dibentuk agar Irian Barat menjadi negara berdiri sendiri. Belanda melakukan politik “Papuanisasi” baik di bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh Belanda dalam rangka menarik opini dunia untuk memperkuat kedudukannya di Irian Barat. Pembentukan parlemen sementara, pendirian Partai Nasional (PARNA), pembentukan tentara Papua akan dibangun dan seterusnya. Komite Partai Nasional Papua ini terdiri dari anggota yang mayoritas berasal dari orang-orang Belanda⁶

Ketegangan semakin meningkat, setelah Belanda mengambil tindakan mendatangkan Kapal Induk *Karel Doorman* untuk memperkuat pangkalan militer yang berbasis di Biak, Irian Barat 1960, juga dikirimnya 2 buah kapal perusak dan 2 buah kapal selam. Sebagai balasan, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan Pemerintah Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Tak cukup hanya dengan pemutusan hubungan, sebulan berikutnya, tanggal 30 September 1960, dalam pidatonya Presiden Soekarno menyatakan tekadnya untuk merebut kembali wilayah Irian Barat walau harus menggunakan kekerasan senjata.⁷

Menghadapi kenyataan tidak adanya lagi peluang yang bisa ditempuh melalui jalur diplomasi, pemerintah Indonesia akhirnya membangun kekuatan angkatan perangnya. Sebagai upaya mengimbangi kekuatan militer Belanda

⁶ A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 : Kenangan Masa Orde lama*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1985, hlm. 83

⁷ Toto Pribadi, *‘Soekarno dan Internasionalisme’ Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988, hlm. 119

yang sudah ada di Irian Barat, Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mencari peralatan dari Uni Soviet karena selama ini pihak negara komunis telah bersedia menjual persenjataan yang diminta. Pada bulan 1960, suatu misi di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional A.H Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan suatu kontrak perjanjian pembelian senjata.⁸

Hasil dari Misi tersebut menghasilkan kesepakatan kontrak bantuan peralatan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Untuk Angkatan Laut berupa 12 buah kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, helikopter-helikopter dan peralatan berat amfibi untuk Korps Komando (KKO) lebih kurang untuk 3 resimen. Untuk Angkatan Udara, dalam kesepakatan kontrak tersebut memesan beberapa pesawat jet tempur MiG-21, Ilyusin 28, TU-16 dan pesawat-pesawat angkut Antonov, beserta 3 satuan pertahanan udara dilengkapi roket beserta radarnya. Seluruh kontrak berjumlah sekitar 500 juta dollar Amerika.⁹ Misi pembelian senjata dari Uni Soviet tersebut merupakan pembelian senjata atas dasar kredit jangka panjang yang tidak membebankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembelian senjata tersebut merupakan misi terbesar dalam senjata Indonesia yang pernah dilakukan dengan luar negeri.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 1961 mengambil tindakan dengan jalan membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) yang bertugas mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam

⁸ A.H Nasution memegang jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional. Lihat : *Sejarah Indonesia Modern*, hlm. 410

⁹ R. Ridhani, *Op. Cit*, hlm. 44

Pembebasan Irian Barat. Pada sidang Depertan pada tanggal 14 Desember 1961 ditetapkan pembentukan suatu Komando Tertinggi (Koti) Pembebasan Irian Barat. Koti terdiri atas Panglima Besar Koti ialah Presiden dan dibantu oleh Ahmad Yani yang terpilih sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Ketika Ahmad Yani menjabat sebagai Kepala Staf Tertinggi Pembebasan Irian Barat, ia memperlihatkan kecakapan serta kematangan pikirannya dalam tindakan politik maupun militer. Presiden sebagai Panglima Koti meminta Ahmad Yani mengenai konsepsi strategi Irian Barat.¹⁰

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden/Panglima Tertinggi ABRI mendeklarasikan Tri Komando Rakyat (Trikorra) di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari Trikorra, dibentuklah Komando Mandala yang dipimpin oleh Suharto, sedangkan Ahmad Yani menjabat Kepala Staf Koti dan merangkap sebagai juru bicara tunggal mengenai pembebasan Irian Barat.¹¹

Ahmad Yani memiliki kontribusi dalam operasi pembebasan Irian Barat dan menjadi bahasan yang menarik bagi peneliti untuk permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peranan Ahmad Yani dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963”**. Adapun alasan penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah, yaitu *pertama*, ingin mengkaji peranan Ahmad Yani selama operasi pembebasan Irian Barat dalam rangka mempertahankan kedaulatan merupakan permasalahan yang cukup menarik. Peran Ahmad Yani tersebut antara lain

¹⁰ Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Achmad Yani: Prajurit Patriot Sejati*, Bandung: CV. IDHAR BANDUNG, 2013, hlm. 88.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87

menjadi Kepala Staf Koti Pembebasan Irian Barat bertugas untuk mendampingi Panglima Tertinggi/ Presiden dan wakilnya dalam menggariskan kebijakan yang akan ditetapkan dalam rangka pembebasan Irian Barat, memimpin suatu misi rahasia dengan tugas khusus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai Irian Barat, memimpin rapat terbatas bersama Gabungan Kepala Staf (GKS) dan Komando Mandala, serta menjadi juru bicara tunggal yg berkaitan tentang berita-berita Operasi Irian Barat *Kedua*, karena masih kurangnya penulisan tentang peranan Jenderal Ahmad Yani khususnya saat operasi militer pembebasan Irian Barat.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang dikemukakan, pembatasan masalah dalam penulisan ini mencakup pembatasan spasial (ruang) dan temporal (waktu). Batasan spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Irian Barat. Sedangkan batasan temporal (waktu) dalam penulisan ini adalah dari tahun 1961-1963 pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Tahun 1961 dipilih menjadi batasan awal dalam penelitian ini karena Pemerintah Indonesia menegaskan, bahwa Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk segera membebaskan Irian Barat sekalipun harus mempergunakan kekerasan senjata. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 dalam suatu rapat umum di Yogyakarta, Kepala Negara

mengumandangkan komando pembebasan Irian Barat yang seterusnya dikenal dengan nama Tri Komado Rakyat (Trikor).¹²

Kemudian batasan akhir penelitian ini adalah pada tahun 1963 karena pada tahun itu berakhir masa Kolonial Belanda di Irian Barat dan sejak saat itu Irian Barat secara *de jure* dan *de facto* berhasil dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1969 dilanjutkan dengan penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada di Irian Barat agar rakyat dapat menentukan nasibnya, yaitu hendak masuk RI atau tidak.¹³ Namun, dalam penelitian ini penulis tidak membahas tentang Pepera, karena fokus penelitian ini hanya membahas peranan Ahmad Yani dalam operasi membebaskan wilayah Irian Barat dimana Ahmad Yani menjabat sebagai kepala staf operasi pembebasan Irian Barat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal di atas permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah “ Peranan Ahmad Yani dalam Operasi Pembebasan Irian Barat (1961 – 1963)”. Untuk membatasi kajian penelitian, maka diajukan rumusan masalah dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana dinamika dalam proses operasi pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963?

¹² Amrin Imran dan Hayun Ugaya dkk, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat*, Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971

¹³ Sayiman Suryohadiprojo, *Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangannya*, Jakarta: PT Intermedia, 1996, hlm. 120

- b. Bagaimana pandangan Dunia Internasional terkait pembebasan Irian Barat?
- c. Bagaimana peran Ahmad Yani dalam operasi pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui apa yang melatarbelakangi Operasi Militer di Irian Barat dan perundingan sengketa wilayah antara pihak Indonesia dan Belanda.
- b. Menguraikan peranan Jenderal Ahmad Yani dalam operasi pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang sejarah militer di Indonesia. Memperoleh wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang peranan Jenderal Ahmad Yani saat operasi pembebasan Irian Barat tahun 1961-1963. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah, terutama sejarah militer Indonesia, dan khususnya peranan Ahmad Yani pada peristiwa pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Operasi Trikora. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menanamkan sikap nasionalisme dan sikap menghargai jasa pahlawan yang berkorban dalam mempertahankan NKRI.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah dan penyajian hasil dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian-kejadian dalam dimensi ruang dan waktu. Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah mempunyai 5 tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik dan keabsahan sumber), (4) interpretasi : analisis, dan (5) penulisan.¹⁴ Langkah-langkah yang akan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tuntutan metode sejarah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik yaitu menentukan topik permasalahan yang akan dikaji. Topik dalam sebuah penelitian harus dipilih berdasarkan

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013, hlm. 69

pendekatan intelektual dan pendekatan emosional.¹⁵ Penulis tertarik mengangkat topik peranan Ahmad Yani dalam Operasi Pembebasan Irian Barat karena sengketa wilayah Irian Barat tidak lepas dari peranan Ahmad Yani. Walaupun tidak terjun langsung dalam operasi lapangan. Namun Ahmad Yani berperan sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Juru Bicara Tunggal, serta memimpin operasi khusus untuk mengumpulkan informasi tentang Irian Barat.

b. Pengumpulan Sumber (*Heuristik*)

Heuristik atau pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapat data dari materi sejarah. Sumber atau data yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.¹⁶ Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber yang relevan atau sesuai dengan judul skripsi. Di tahap ini penulis memperoleh sumber dari Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), Museum Satria Mandala, Perpustakaan Pusjarah TNI, Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS), Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.

Adapun sumber yang dipakai dalam menulis karya ini adalah beberapa sumber yang penulis anggap sesuai dengan judul yang ada. Beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini, antara lain.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

¹⁶ *Ibid*, hlm.73

1. *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat*. Saleh As'ad Djamhari. 1995. Buku ini berisi merupakan buku utama yang berisi mengenai perjuangan Indonesia dalam merebut wilayah Irian Barat. Dimulai dari kegagalan diplomasi secara bilateral maupun internasional, konfrontasi total dan militer, dan jalannya operasi militer secara detail.
2. *Ahmad Yani Sebuah Kenang-Kenangan*. Ibu. A. Yani. 1982. Buku ini berisi biografi Ahmad Yani dan karir militernya.
3. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Muhammad Cholil. 1971. Buku ini berisi mengenai persiapan pemerintahan Indonesia dalam menyusun dan merencanakan operasi pembebasan Irian Barat hingga akhir penyelesaian.
4. *Mayor Jenderal Soerharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*. R. Ridhani. 2009. Buku ini berisi uraian terbentuknya organisasi-organisasi guna mendukung rencana operasi militer seperti FNIB, GKS, Depertan dan Komando Mandala.
5. *Profil Seorang Prajurit TNI*. Amelia Yani. 1990. Buku ini tentang bagaimana sosok Ahmad Yani dan perannya dalam Angkatan Darat termasuk merebut wilayah Irian Barat.

c. Kritik Sumber (*Verifikasi*)

Setelah sumber berhasil dikumpulkan, maka tahapan selanjutnya adalah kritik. Kritik terdiri dari dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstren. Kritik sumber atau verifikasi adalah pengujian terhadap sumber-sumber sejarah, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber dan tingkat kredibilitas (dapat dipercaya) dari sumber yang sudah dikumpulkan.¹⁷ Kritik intern yang dilakukan penulis untuk menguji kebenaran dan keakuratan data, dalam penelitian ini adalah misalnya membandingkan buku dari dinas militer dan buku dari tulisan seorang tokoh yang membahas Ahmad Yani di dalamnya. Dalam penulisannya Buku dari dinas militer berisi informasi-informasi umum mengenai Trikora. Sedangkan buku dari seorang tokoh membahas secara detail bagaimana peran Ahmad Yani dalam operasi militer Irian Barat. Kritik ekstern yang dilakukan penulis pada sumber berupa Arsip adalah dengan melihat kertas, tanggal, waktu pembuatan dan tulisan atau ejaan yang digunakan. Karena penulis memperolehnya dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dan poin-poin yang disebutkan sesuai dengan arsip yang didapatkan, maka arsip tersebut merupakan arsip asli. Sementara itu untuk sumber koran, penulis meneliti isi sumber keaslian dengan cara meneliti tulisan atau ejaan, bahasa dan gaya penulisan sezamannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 77

d. Interpretasi

Setelah dilakukan kritik sumber atau verifikasi, maka selanjutnya dilakukan penafsiran dari fakta-fakta yang diperoleh, peneliti mulai merekonstruksi dan menghasilkan sebuah penafsiran awal yang didukung oleh analisis fakta-fakta yang telah diuji keakuratannya.

e. Penulisan (*Historiografi*)

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau. Di tahap terakhir ini fakta-fakta yang sudah melewati tahapan di atas akan ditulis secara ilmiah sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan dan diuji.¹⁸

2. Sumber Penelitian

Sumber dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Dokumen dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), antara lain: Surat Perintah Harian Presiden/Komando Tertinggi Angkatan Darat Untuk Pembebasan Irian Barat Tanggal 19 Desember 1961, dan Surat Keputusan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda Tahun 1958.

b. Sumber Sekunder

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 70

Sumber sekunder adalah peristiwa yang disampaikan bukan dari saksi mata dan hasil laporan seperti surat kabar. Penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan dan surat kabar sezaman.

Sumber sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur yang terkait melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, dan Perpustakaan Pusat Sejarah TNI .
Sumber Penelitian : Buku-buku seperti Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat (TRIKORA) karya Drs. Saleh A Djamhari, buku karya Amelia Yani yang berjudul Profil Seorang Prajurit TNI, Ahmad Yani Sebuah Kenang-kenangan, Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat karya M. Cholil, buku yang berjudul Memenuhi Panggilan Tugas Jilid V : Kenangan Masa Orde Lama karya A.H Nasution, buku Api perjuangan pembebasan Irian Barat, dan masih banyak lagi literatur-literatur yang berkaitan mengenai peran Ahmad Yani dalam operasi pembebasan Irian Barat.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian “Peranan Ahmad Yani dalam Operasi Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1963” agar mudah dipahami dan dapat diperoleh gambaran dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti menyusun secara sistematis hasil penelitian tersebut dalam empat bab, yaitu :

Bab I ini akan mengemukakan secara rinci mengenai dasar pemikiran yang menjadi alasan peneliti sehingga tertarik mengkaji penelitian sebagai bahan skripsi. Kemudian perumusan masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber-sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan diuraikan latar belakang operasi militer di Irian Barat tahun 1961-1963. Di sini peneliti menjelaskan perjuangan-perjuangan diplomasi yang gagal selama 18 tahun kemerdekaan, persiapan konfrontasi militer, Trikora dan pembentukan Komando Mandala Untuk membebaskan Irian Barat.

Bab III, Bab ini memaparkan mengenai peranan Jenderal Ahmad Yani untuk merebut wilayah Irian Barat Tahun 1961-1963. Bab ini menjabarkan secara rinci mengenai peran Ahmad Yani dalam operasi militer di Irian Barat dimana beliau menjabat sebagai kepala staf operasi pembebasan Irian Barat.

Bab IV Kesimpulan, di dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah secara keseluruhan, setelah pengkajian pada bab-bab sebelumnya.